



Desak BPK Laporkan ke KPK

Terkait Temuan Dugaan Penyimpangan APBD 2014

SEJUMLAH kalangan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan APBD 2014 yang terbukti berindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Satu di antaranya terkait pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sebab berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, jika dalam pemeriksaannya BPK menemukan indikasi kerugian negara, maka BPK wajib melaporkan ke aparat hukum. "Harusnya BPK menindaklanjuti temuannya dengan melapor ke aparat hukum, bisa KPK, kepolisian, atau kejaksaan," ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, kemarin (13/7).

Ia mengatakan, selain soal potensi kerugian negara dalam pembelian tanah RS Sumber Waras, BPK juga menemukan potensi kerugian dalam pengelolaan aset berupa lahan Lokasari, Mangga Dua. Potensi kerugiannya juga mencapai miliaran rupiah. "Hal itu juga harus ikut dilaporkan," tegas Amir.

Pelaporan itu, sambung dia, sangat penting. Sehingga bisa diketahui sejauh mana kerugian yang diderita negara. Kemudian dicari pihak yang bersalah, untuk mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. "Kami berharap BPK tidak tinggal diam," ucap dia.

Di sisi lain, Juru Bicara BPK Yudi Ramdan menegaskan, tetap meyakini pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras tidak wajar sesuai hasil audit laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. Seluruh audit yang dilakukan oleh BPK terkait kegiatan keuangan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan secara sistematis dan dengan prosedur yang sesuai.

BPK juga menyatakan tak ada intensi lebih jauh terkait kecurigaan terhadap pemeriksaan pada penyediaan lahan bagi Rumah Sakit Sumber Waras. Dengan demikian, BPK tetap teguh pada pernyataan sebelumnya bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan tersebut harusnya sama dengan bangunan-bangunan di sekitarnya.

"BPK memiliki standar pemeriksaan yang ketat dan memiliki proses quality control dan quality assurance yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dengan proses seperti itu, jika memang ditemukan ketidaksesuaian teknis pada pengadaan lahan itu, maka kami anggap tetap tidak sesuai," papar dia. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam audit laporan keuangan tahun 2014. **(wok)**

Potensi kerugian DKI tahun 2014

- **Pembelian lahan di RS Sumber Waras senilai Rp 880 miliar:**
 - Tak sesuai Nilai Jual Objek Pajak di lahan seluas 3,7 hektare
 - Harusnya bisa berhemat Rp 191 miliar
 - Auditor BPK tidak menemukan kelayakan teknis
 - Kesimpulannya, proses pengadaan lahan belum maksimal
 - Rencana pembangunan pusat pengobatan kanker
- **BPK juga menemukan adanya kelebihan premi asuransi sebesar Rp 3,6 miliar**
- **Biaya operasional pendidikan sebesar Rp 3,05 miliar**
- **Lemahnya pengawasan pada pengadaan lahan di Mangga Dua seluas 30,88 hektare**